

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA HALAL SEBAGAI STRATEGI *PEACEBUILDING* THAILAND PADA KONFLIK ETNIS MUSLIM MELAYU DI KAWASAN THAILAND SELATAN

Kartina Indah Puspitasari^{1*}, Zulkhair Burhan², Umar Ramli³

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Bosowa. Indonesia

³Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: puspitakartina@gmail.com

Citation (APA):

Puspitasari, K. I., Burhan, Z., & Ramli, U. (2024). Implementasi Pengembangan Industri Pariwisata Halal Sebagai Strategi *Peacebuilding* Thailand Pada Konflik Etnis Muslim Melayu di Kawasan Thailand Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 281–295. Retrieved from <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/3599>

Email Authors:

puspitakartina@gmail.com
zulkhair.burhan@universitasbosowa.ac.id
oemar.sq@gmail.com

Submitted: 08 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

Published: 16 Oktober, 2024

Copyright (c) 2024 Kartina Indah Puspitasari, Zulkhair Burhan, Umar Ramli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Perkembangan industri pariwisata halal saat ini telah menjadi suatu fenomena global yang ramai dikembangkan oleh berbagai negara, baik negara mayoritas muslim maupun minoritas muslim. Adapun salah satu negara minoritas muslim yang saat ini berhasil mengembangkan industri pariwisata halalnya adalah Thailand. Tujuan Thailand dalam mengembangkan industri pariwisata halal bukan hanya sebagai sektor yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Namun industri pariwisata halal juga menjadi instrumen perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam meredam konflik di kawasan Thailand Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan konsep *peacebuilding* dari Johan Galtung untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Thailand mencoba melakukan pendekatan baru dengan memanfaatkan pariwisata halal sebagai strategi *peacebuilding* Thailand dalam meredam konflik di kawasan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Thailand ikut melibatkan langsung kawasan Thailand Selatan sebagai salah satu aktor penting dalam pengimplementasian dan juga pengembangan industri pariwisata halal. Thailand Selatan saat ini menjadi pusat industri halal Thailand yang telah memberikan dampak positif terhadap taraf kesejahteraan masyarakat di kawasan. Peningkatan perekonomian dan lapangan pekerjaan serta pemenuhan hak-hak bagi kelompok etnis muslim melayu pun akhirnya secara perlahan telah didapatkan sehingga dapat meredam konflik di kawasan tersebut.

Kata kunci: Industri Pariwisata Halal; Konflik Thailand Selatan; *Peacebuilding*

ABSTRACT

The development of the halal tourist industry has now become a global phenomenon that is being developed by many countries, both Muslim majority and Muslim minority. One of the Muslim minority countries that currently successfully developing halal tourism is Thailand. Thailand's goal in developing the halal tourism is not only as a sector that can provide economic benefits. However, the halal tourism industry is also an instrument of peace that the Thai government is trying to do in reducing the conflict in the Southern Thailand region. In this study researchers used qualitative methods and the concept of Peacebuilding from Johan Galtung to explain how the Thai government tried to take a new approach by utilizing halal tourism as Thailand's peacebuilding strategy to reduce conflict in the region. The result of this research show that the Thai government directly involves the Southern Thailand as an important actor in implementing and developing the halal tourism industry. Southern Thailand is currently the center of Thailand's halal industry which has had a positive impact on the level of welfare of the people in the region. Increasing the economy and job opportunities as well as fulfilling the rights of the Malay Muslim ethnic group has finally slowly been achieved so as to reduce the conflict in the region.

Keywords: Halal Tourism Industry, Southern Thailand Conflict, *Peacebuilding*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang dapat menjadi investasi yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan industri pariwisata menjadi salah satu

penyumbang devisa negara yang cukup besar. Saat ini industri pariwisata juga menjadi fenomena kontemporer yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dunia sebagai dampak dari globalisasi. Adapun dalam beberapa dekade industri pariwisata sedang mengalami peningkatan kunjungan wisatawan muslim dari berbagai negara sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya konsep halal di dalam industri pariwisata saat ini (Cahayani & Aisyah, 2022). Pengembangan industri pariwisata halal sendiri lahir dari tiga alasan utama. Alasan pertama, yaitu karena besarnya jumlah populasi muslim yang mampu mencapai lebih dari dua miliar umat muslim. Bahkan dari jumlah tersebut menjadikan umat muslim sebagai penganut agama terbesar kedua di dunia. Kedua, besarnya jumlah terhadap gaya hidup umat muslim yang diperkirakan menghabiskan US\$ 2,1 triliun, sedangkan untuk di sektor pariwisata umat muslim menghabiskan US\$ 177 miliar (Hussain, 2016). Ketiga, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan muslim dunia, di mana tercatat bahwa jumlah wisatawan muslim secara global meningkat mencapai 160 juta wisatawan pada tahun 2019 dari 140 juta pengunjung muslim di tahun 2018 (Crescent Rating, 2022).

Dengan ketiga alasan tersebut yang juga telah membuat wisatawan muslim saat ini menjadi kelompok sasaran utama industri pariwisata global. Maka dari itu saat ini banyak negara-negara yang berusaha untuk mengembangkan industri pariwisata halal sebagai peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini juga membuat pariwisata halal sebagai lokasi kegiatan berwisata yang bukan hanya terbatas pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi wisata halal saat ini dapat dinikmati bahkan di negara-negara di mana penduduknya merupakan mayoritas non muslim atau Islam menjadi minoritas di negara tersebut. Adapun salah satu negara minoritas muslim yang berhasil mengembangkan industri pariwisata halalnya adalah Thailand.

Thailand merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Buddha. Namun Thailand mampu menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mengembangkan industri pariwisata halal. Bukti keseriusan Thailand dalam mengembangkan industri ini dapat dilihat dari berbagai layanan fasilitas yang dikembangkan oleh Thailand sudah masuk dalam kategori ramah muslim. Bahkan untuk memastikan kehalalan dari produk dan layanan yang disediakan, Thailand sudah memiliki lembaga sertifikasi halal dari *Halal Standard Institute of Thailand* yang merupakan badan di bawah naungan *Central Islamic Committee of Thailand*. Selain itu, untuk lebih memudahkan wisatawan muslim dalam menemukan layanan dan fasilitas halal, Thailand telah meluncurkan aplikasi khusus yaitu "*Thailand Muslim Friendly Destinatio*" (CNN Indonesia, 2023). Upaya yang dilakukan oleh Thailand tersebut juga merupakan bentuk keinginan Thailand untuk memperluas pasar dan ingin menjadi pusat wisata halal dunia. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data dari *Global Muslim Travel Index* menunjukkan bahwa Thailand mampu menduduki peringkat di 5 besar dari Top 10 Non OKI Destination yang ramah muslim secara stabil dari 2017-2023.

Namun terdapat sesuatu yang menarik dari keberhasilan Thailand dalam mengembangkan industri halalnya sebagai bentuk diferensiasi dan ekspansi pasar. Hal ini dikarenakan demografis jumlah populasi muslim di Thailand diperkirakan sekitar 7,5 juta atau sekitar 12% dari total 62,5 juta populasi Thailand (Royal Thai Embassy, 2019). Selain itu mayoritas dari muslim yang ada di Thailand tersebar sekitar 80% di wilayah Thailand Selatan (Rabbani, 2023). Dimana wilayah ini merupakan wilayah yang sering mengalami

gejolak stabilitas politik dan persinggungan antara pemerintah Thailand dan masyarakat Muslim. Sehingga hal inilah yang membuat rekam jejak hubungan yang kurang baik antar pemerintah Thailand dan masyarakat muslim yang ada di Thailand.

Secara faktual, fenomena sosial-politik di Thailand Selatan merupakan situasi konflik antara penduduk Muslim Thai atau etnis Muslim-Melayu dengan negara Thailand yang memegang teguh ideologi Buddha. Jika dilihat secara histori, konflik ini muncul seiring dengan adanya perluasan wilayah kerajaan Thailand ke wilayah Thailand Selatan yang terdiri dari Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Adanya perluasan tersebut membuat Thailand Selatan jatuh ke kekuasaan pemerintahan kerajaan Thailand pada tahun 1909. Di tahun tersebut terdapat *Traktat Anglo-Siam* yang dibuat oleh pemerintah Thailand dan memberikan dampak terhadap pencabutan hak-hak dan martabat Muslim Thailand Selatan. Hal inilah yang kemudian membuat munculnya aksi perlawanan kaum minoritas muslim yang ingin memisahkan diri dari pemerintah Thailand dan terus berlanjut menjadi konflik berkepanjangan. Bentuk perlawanan tersebut kemudian dianggap sebagai unjuk separatis yang membuat pemerintah memberlakukan darurat militer di wilayah tersebut (Rahayu dkk, 2022).

Selain itu konflik yang ada di Thailand Selatan juga disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah Thailand terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut (Islam, 2014). Maka dari itu tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kawasan Thailand Selatan juga menjadi pemicu konflik ini semakin memanas dan menjadi ancaman nasional Thailand. Oleh sebab itu pemerintah Thailand telah mengupayakan untuk mengakhiri konflik yang ada di kawasan tersebut. Namun sayangnya upaya yang dilakukan tersebut kebanyakan menggunakan kebijakan yang menekan kelompok separatis dengan kekerasan sehingga upaya tersebut justru malah memperparah situasi. Seiring berjalannya waktu dan upaya penyelesaian konflik terus dilakukan, pemerintah Thailand melihat peluang di industri halal sebagai ekspansi pasar yang menjanjikan khususnya di bidang industri pariwisata halal. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong Thailand menggarap peluang industri ini dengan melakukan pengembangan industri pariwisata halalnya dengan menggandeng kawasan Thailand Selatan sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di Thailand.

Dengan adanya kebijakan menggandeng kawasan Thailand Selatan dalam industri pariwisata halal ini tentunya dapat memberikan dampak untuk menggerakkan kembali perekonomian yang ada di kawasan tersebut. Hal ini juga membuat masyarakat muslim di kawasan Thailand Selatan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas pariwisata halal. Tentunya dengan kondisi ini membuat umat muslim di Thailand Selatan akan merasa diakui oleh pemerintah Thailand. Sehingga akan berdampak pula pada peredaman upaya-upaya pemisahan diri umat muslim di kawasan Thailand Selatan karena dulunya merasa teralienasi dan termarginalkan secara ekonomi (Dwijadayadi D.K, 2016). Oleh sebab itu penelitian ini akan menganalisa bagaimana implementasi industri pariwisata halal yang dikembangkan oleh Thailand dapat dilihat sebagai bagian dari instrumen perdamaian sekaligus menjadi strategi *Peacebuilding* Thailand pada konflik etnis Muslim-Melayu di kawasan Thailand Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sebagaimana penelitian kualitatif ini secara umum akan merujuk pada proses pengumpulan data, strategi,

dan teknik analisis data terkait isu pariwisata halal yang dinilai berisikan dengan upaya perdamaian konflik di kawasan Thailand Selatan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (*library research*) secara online. Sementara jenis data yang digunakan merupakan jenis data sekunder, di mana data diperoleh langsung melalui situs website resmi dari organisasi internasional, situs website lembaga pemerintah, dan situs lembaga lainnya. Sedangkan data lainnya juga didapatkan melalui laporan, dokumen, tinjauan literatur, buku, jurnal penelitian, dan situ website berita yang terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Taraf Kesejahteraan Thailand Selatan

Terjadinya konflik etnis muslim melayu yang ada di Thailand Selatan sejak tahun 2004 telah mengakibatkan sekitar lebih dari 7.000 korban yang berjatuh di provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat (Aljazeera, 2024). Kondisi ini membuat situasi di kawasan Thailand Selatan menjadi semakin panas dan tidak kondusif akibat pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatistis dan juga kelompok militer. Konflik ini kemudian menjadi ancaman nasional bagi pemerintah Thailand. Maka dari itu pemerintah Thailand mulai berkomitmen untuk mengatasi konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Thailand mencoba melakukan pendekatan yang lebih komprehensif yang termasuk di dalamnya terdapat bentuk desentralisasi dan penghormatan terhadap etnis muslim melayu di kawasan Thailand Selatan. Hal ini dilakukan karena mengingat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, nyatanya belum memberikan hasil yang signifikan dalam meredam konflik yang ada.

Oleh sebab itu melalui pengembangan industri pariwisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dinilai dapat menjadi bentuk pendekatan yang dapat mengatasi konflik yang ada. Tentunya pendekatan ini memiliki tujuan agar pemerintah Thailand bisa mengambil kembali kepercayaan umat muslim di kawasan Thailand Selatan. Di mana dengan adanya pengembangan industri ini juga akan dilihat sebagai wujud pemerintah Thailand yang telah memberikan pengakuan terhadap agama Islam di Thailand dan masyarakat muslim mulai merasa diperhatikan melalui pengakuan tersebut. Disisi lain kawasan Thailand Selatan memiliki beberapa daerah seperti Provinsi Yala, Pattani, Satun, Songkhla dan Narathiwat yang masih mengalami ketertinggalan dari segi ekonomi sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya konflik pemberontakan di kawasan tersebut karena pemerintah dianggap tidak bersikap adil dalam peningkatan perekonomian.

Sebagaimana tujuan dari pengembangan industri pariwisata halal adalah menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian di Thailand. Maka melalui inisiatif pemerintah Thailand dalam meningkatkan industri pariwisata halal telah dirasa mampu memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat, khususnya yang ada di Thailand Selatan. Hal ini dikarenakan saat ini industri pariwisata halal mampu memberikan solusi dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan di berbagai sektor terkait. Segala macam akomodasi, restoran, dan pelayanan wisata yang memenuhi standar halal tentu membutuhkan tenaga kerja tambahan dalam sektor ini. Apalagi kawasan Thailand Selatan menjadi salah satu pusat pengembangan industri halal Thailand karena mengingat potensi umat muslim yang ada di kawasan ini membuat pengimplementasian industri pariwisata halal di kawasan Thailand Selatan bukan hanya mendorong pemenuhan hak-hak serta kebutuhan wisatawan muslim saja. Namun industri ini juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas industri ini.

Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata halal juga cenderung bersirkulasi di dalam komunitas lokal. Oleh sebab itu industri pariwisata halal mengarah para *multiplier effect*, di mana uang yang dihabiskan oleh wisatawan akan berdampak pada berbagai sektor ekonomi lainnya. Sektor tersebut diantaranya pedagang lokal, transportasi, pertanian, dan kerajinan. Dengan demikian, adanya peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas industri pariwisata halal memiliki dampak yang luas dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Mustaqim, 2023).

Dampak positif dari aktivitas industri pariwisata halal terhadap peningkatan ekonomi negara dan lokal dilihat dari sejak adanya pengembangan industri pariwisata halal telah menjadi sektor penyumbang sekitar 20% dari total PDB negara. Sehingga mampu memberikan sekitar US\$64 miliar dari perekonomian lokal di Thailand (Medina, 2022). Tentunya nilai tersebut didapatkan melalui pajak dan pendapatan dari wisatawan asing yang datang berkunjung ke negara ini. Berdasarkan hal tersebut implementasi pengembangan industri pariwisata halal telah mampu memberikan peningkatan pendapatan perkapita di kawasan Thailand Selatan khususnya daerah yang sering mengalami gejolak politik. Berdasarkan dari *Refer to National Statistical Office of Thailand* yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita untuk wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat sekitar 4.183 Bath, 5.700 Bath, dan 3.251 Bath (Abdulmani, 2013). Sementara pada tahun 2018 *National Economic and Social Development Council* (NESDC) menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita di ketiga wilayah perbatasan Thailand Selatan. Di mana Pattani mencapai 75.9979 Bath, Yala sebesar 91.815 Bath dan Songkhla sebesar 151.918 Bath (Theparat, 2021).

Selain itu melalui jumlah pendapatan yang telah diperoleh dari industri pariwisata halal tersebut, selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Sebagai contohnya pendapatan yang dihasilkan dari industri ini digunakan untuk membangun sekitar 2.000 masjid yang ada di Thailand. Bahkan terdapat 200 sekolah muslim yang dibangun untuk pengajaran sekuler dan keagamaan di Thailand (Royal Thai Embassy, 2019). Bukan hanya itu, pemerintah juga telah membuat *Southern Border Economic Corridor (SBEC)* yang mencakup provinsi perbatasan selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat serta empat distrik di provinsi Songkhla-Chana, Na Thawi, Saba Yoi dan Thepa. SBEC ini dibentuk dan telah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil alih rencana pembangunan ekonomi di wilayah selatan dengan tujuan meningkatkan pendapatan penduduk desa di wilayah tersebut (Theparat, 2021).

Keterlibatan Thailand Selatan Dalam Industri Pariwisata Halal

Selain mampu mengubah kondisi perekonomian di kawasan Thailand Selatan, kebijakan yang diterapkan Thailand dalam mengembangkan industri pariwisata halal juga dapat meningkatkan hubungan antar pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung industri pariwisata halal telah memberikan ruang bagi pemerintah dan juga kelompok separatis yang dulunya ingin memisahkan diri untuk saling berinteraksi satu sama lain. Pemerintah Thailand menggunakan industri pariwisata sebagai sarana integrasi sosial, politik dan budaya yang dapat memajukan sektor ekonomi bagi penduduk minoritas muslim. Dimana Thailand juga telah memastikan adanya integrasi komprehensif terhadap populasi umat muslim yang menjadi prioritas nasional Thailand.

Bahkan saat ini perkembangan industri pariwisata halal telah mengubah situasi konflik dimana pemerintah Thailand dulunya merenggut hak dan martabat umat muslim di Thailand Selatan sekarang membuat pemerintah Thailand telah memberikan dan juga melindungi hak-hak dari kaum muslim yang ada di kawasan tersebut. Saat ini masyarakat muslim juga telah turut aktif dalam mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik setempat. Hal ini dilihat ketika pemerintah Thailand telah mengakui adanya dewan agama islam atau *Chularatchamontri*. Dewan agama islam ini adalah badan yang memayungi elemen umat Islam serta menjadi jembatan komunikasi dan kepentingan antar negara dan rakyat muslim (Republika, 2023). Adapun pada tahun 2010 Arziz Pitakkumphol menjadi orang Thailand Selatan pertama yang terpilih sebagai kepala dewan agama islam (Pisan, 2010).

Oleh sebab itu kebijakan yang diambil Thailand dalam industri pariwisata halal telah membuat masyarakat Thailand Selatan mulai mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Selain itu Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada masyarakat muslim dalam mengamalkan ajaran agama mereka dengan memberikan fasilitas pembangunan masjid dan juga sekolah muslim. Adanya upaya pemerataan pembangunan di kawasan Thailand Selatan juga diperlihatkan oleh pemerintah dengan menggandeng kawasan tersebut menjadi pusat industri halal Thailand. Hal ini sebagaimana tujuan pengembangan industri pariwisata halal dilakukan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dan keuntungan dari industri ini. Sehingga nantinya pemerintah dapat membangun kesejahteraan dan perdamaian serta dapat mewujudkan keamanan negara secara nasional.

Kawasan Thailand Selatan sebagai pusat industri halal memiliki pusat sektor makanan halal Thailand yang berkembang 20% setiap tahunnya. Disisi lain terdapat 30.000 pabrik di Thailand dimana 8.000 diantaranya merupakan pabrik makanan halal. Selain itu terdapat 1.800 pabrik yang menggunakan akreditasi label halal, tidak hanya makanan, pariwisata, bisnis hotel, dan layanan kesehatan juga mendapatkan sertifikasi halal (Purnama, dkk., 2021). Perlu digaris bawahi bahwa makanan halal memiliki peran sentral dalam pengembangan industri pariwisata halal. Hal ini dikarenakan sektor makanan halal melibatkan pemenuhan akan kebutuhan gizi wisatawan muslim dengan makanan yang harus mematuhi standar halal. Makanan halal sendiri juga merupakan produk pangan yang dihasilkan dari industri pertanian dimana untuk kawasan Thailand Selatan memang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sehingga pemerintah juga ikut mengupayakan peningkatan promosi produk pertanian berstandar halal untuk kebutuhan makanan halal. Upaya ini ditujukan untuk memperluas kerjasama perdagangan dan investasi melalui industri halal Thailand.

Adanya perkembangan sektor produk halal saat ini telah membuat Thailand juga ikut menjadi eksportir produk halal terbesar ke-12 global dan produsen makanan halal terbesar kelima. Untuk sektor makanan halal sendiri telah menyumbang 20% dari total ekspor makanan Thailand dan 60% ekspor makanan halal Thailand yang ditujukan ke negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Tentunya hal ini akan sangat berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan pusat industri halal ini (Medina, 2022). Selain itu ekspor makanan halal negara Thailand telah mencapai US\$ 6 miliar pada tahun 2021/2022 dan menargetkan pertumbuhan sebesar 3% pada tahun 2023. Adapun ekspor terbesar thailand dalam produk pangan dan makanan halal yaitu beras, gula, makanan laut kaleng, olahan buah-buahan, sayuran, minuman non-alkohol, dan makanan organik dan fungsional (Ahmad H.M., 2023).

Oleh sebab itu dengan adanya perkembangan dan dampak yang besar yang dihasilkan dari industri pariwisata halal membuat pemerintah Thailand memfokuskan diri untuk terus menggandeng dan memberdayakan kawasan Thailand Selatan. Apalagi kawasan tersebut menjadi wilayah dengan total jumlah penduduk muslim terbanyak di Thailand yang memiliki pengalaman dalam membuat dan mengolah kebutuhan pangan halal mereka. Sehingga hal inilah yang membuat Thailand menjadikan pusat industri halal Thailand berada di kawasan Thailand Selatan. Selain itu fokus pemerintah dalam industri halal khususnya yang ada di kawasan Thailand Selatan bukan hanya sekedar menjadi perubahan kebijakan dalam meredam konflik yang ada di kawasan ini. Melainkan adanya pusat industri halal telah membuat adanya transformasi ekonomi. Dimana perubahan tersebut telah menjadikan kawasan Thailand Selatan sebagai pusat inovasi dan ekspor produk halal Thailand yang dipasarkan secara global.

Saat ini untuk terus mengembangkan industri halal di kawasan Thailand Selatan pemerintah membuat *Halal Economic Corridor* (HEC). Koridor perekonomian halal ini memuat visi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Thailand Selatan sebagai pusat industri halal. Khususnya untuk provinsi Yala, Pattani, Narathiwat, Satun dan beberapa wilayah lainnya di bagian Selatan yang sebelumnya menjadi kawasan paling mengalami konflik etnis agama ini. Adanya visi tersebut telah menjadi bukti komitmen pemerintah Thailand dalam membangun ekonomi yang inklusif (Ahmad, 2024). Keseriusan Thailand untuk membuat koridor perekonomian halal Thailand Selatan juga dilihat dari adanya upaya mempromosikan kawasan ini sebagai pusat industri halal Thailand. Bentuk promosi tersebut dilakukan oleh pemerintah Thailand dengan mengadakan *Five Southern Border Provinces Halal Expo*. Kegiatan ini semacam bentuk pameran yang dibuat untuk mempromosikan dan mendukung segala jenis usaha halal yang ada di provinsi-provinsi selatan (Ahmad, 2014). Adapun pelopor dari inisiatif *Halal economic Corridor* (HEC) ini adalah Laksamana Muda Somikat Pongprayoorn yang merupakan Sekretaris Jenderal Pusat *Southern Border Provinces Administrative Center* (SBPAC). Pembentukan HEC ini dilandaskan dengan adanya sejarah hubungan perdagangan kawasan Thailand Selatan dengan Bangsa Arab serta adanya populasi muslim sekitar 1,6 miliar di seluruh negara anggota Organisasi Kerajaan Islam menjadikan peluang koridor ini digunakan sebagai upaya pemanfaatan pasar yang luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Disisi lain HEC Juga hampir sama dengan *Five Southern Border Provinces Halal Expo* yang memiliki fungsi untuk mempromosikan produksi dan ekspor produk halal yang ada di kawasan Thailand Selatan. Namun dalam hal ini produksi dan ekspor daging halal yang lebih banyak di promosikan oleh HES seperti daging sapi, ayam dan kambing. Adapun semua daging-daging tersebut juga diekspor ke negara-negara islam dunia. Untuk mencapai semua tujuan dari kedua inisiasi ini maka SBAPC telah berkolaborasi dengan beberapa mitra seperti Departemen Peternakan, Dewan Petani Nasional dan berbagai asosiasi peternakan sapi untuk bisa mendorong 10.000 peternak di lima provinsi Thailand Selatan, untuk berpartisipasi dalam kampanye produksi daging halal. Bukan hanya ekspor daging halal, HEC juga memiliki tujuan untuk bisa menarik kegiatan pariwisata dan kesehatan yang ramah muslim. Di mana rumah sakit, hotel, dan spa setempat didorong untuk menerapkan praktik halal yang dapat melayani wisatawan muslim di seluruh dunia (Pattaya Mail, 2023).

Melalui upaya dalam mempromosikan kawasan Thailand Selatan sebagai pusat industri halal, tentunya dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah Thailand mengupayakan adanya rekonsiliasi di

kawasan ini. Hal ini sebagaimana pemerintah Thailand mengupayakan keterlibatan Thailand Selatan dalam mengembangkan industri halal. Tentunya akan berdampak dalam menggerakkan kembali aspek pembangunan yang sebelumnya tertinggal di kawasan tersebut akibat adanya konflik. Selain itu hasil keuntungan dari adanya industri produk halal dan ekspor produk halal ini juga telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian di kawasan Thailand Selatan. Oleh sebab itu pemerintah telah dianggap berhasil memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam mengambil keuntungan dari adanya industri tersebut.

Pemberdayaan Kawasan Thailand Selatan Melalui Kerjasama IMT-GT

Berdasarkan data dari *Pew Research Center* menunjukkan bahwa jumlah populasi umat muslim global terus meningkat dan berkembang dua kali lipat dari populasi non muslim. Tercatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata umat muslim mencapai 1,5% dan 0.7% untuk pertumbuhan tahunan rata-rata umat non-muslim. Umat muslim juga diperkirakan mampu mencapai 26,4% dari total proyeksi populasi dunia sebesar 8,3 miliar di tahun 2030 mendatang. Perkembangan ini naik dari 23,4% dari perkiraan populasi dunia tahun 2010 sebesar 6,9 miliar (*Pew Research Center, 2011*). Adanya perkembangan populasi umat muslim yang besar dan terus meningkat akan dilihat sebagai suatu fenomena yang dapat menjadi peluang untuk target pasar global. Hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah populasi muslim dunia tentu akan meningkatkan kebutuhan produk halal yang dibutuhkan oleh umat muslim. Oleh sebab itu kondisi inilah yang membuat banyak negara-negara mulai merancang strategi untuk mengembangkan industri halalnya dengan memenuhi kebutuhan produk halal muslim melalui inisiasi kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara dalam mengembangkan industri halal adalah *Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*.

IMT-GT merupakan sebuah inisiatif kerjasama sub regional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang dibentuk 1993. Tujuan pembentukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT (*Kemenlu RI, 2019*). Adapun wilayah perbatasan tersebut yaitu Thailand di bagian Selatan dan Malaysia di bagian utara berbagi perbatasan di jalur darat dan terpisah dari Sumatra, Indonesia hanya melalui Selat Malaka. Berikut daftar wilayah perbatasan yang menjadi fokus pengembangan dari bagian kerjasama IMT-GT ini:

Tabel I: Wilayah bagian dan provinsi di perbatasan negara-negara IMT-GT

INDONESIA	MALAYSIA	THAILAND
Aceh	Negeri Sembilan	Chumphon
Bangka Belitung	Penang	Krabi
Bengkulu	Perak	Songkhla
Jambi	Perlis	Nakhon Si Thammarat
Lampung	Selangor	Satun
Sumatera Utara	Kedah	Narathiwat
Sumatera Selatan	Kelantan	Pattani
Riau	Melaka	Yala
Kepulauan Riau		Trang
Sumatera Barat		Phattahalung
		Surat Thani

Sumber: imtgt.org

Adapun dalam kerjasama ini memiliki beberapa pilar strategis yang menjadi fokus kerjasama yang dibentuk ketiga negara tersebut demi mencapai visi utama dari IMT-GT 2036 yaitu “*IMT-GT Envisions a Seamless, Progressive, Prosperous and Peaceful Subregion With Improved Quality of Life*”, pilar-pilar tersebut tertuang di dalam *Implementation Blueprint* (IB) IMT-GT. Di tahun 2017 merupakan tahun awal pelaksanaan dari IB IMT-GT 2017-2021 yang memiliki tujuh pilar strategis di dalamnya. Ketujuh pilar tersebut adalah Pertanian dan Industri Berbasis Agro, Pariwisata, Produk dan Layanan Halal, Transportasi dan Konektivitas TIK, Fasilitas Perdagangan dan Investasi, Lingkungan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuh pilar tersebut telah diidentifikasi sebagai fokus utama yang akan menghasilkan dampak ekonomi dan sosial paling signifikan pada daerah sub-kawasan bagi negara anggota IMT-GT (imtgt.org, n.d).

Dalam menjalankan pilar-pilar strategi dari IMT-GT, terdapat fokus kerjasama yang dilakukan oleh negara anggota IMT-GT ini yaitu pengembangan industri halal dimana pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang terlibat. Sehingga hal tersebutlah yang membuat negara IMT-GT juga menaruh perhatian mereka terhadap industri pariwisata halal saat ini. Bukan tanpa sebab IMT-GT menjadikan industri pariwisata halal sebagai fokus mereka dalam kerja sama ini. Khususnya Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai negara anggota ASEAN, menjadikan industri pariwisata sebagai sektor yang berpeluang untuk banyak menarik perhatian masyarakat global dan mampu meningkatkan serta memperkenalkan budaya dari negara mereka. Oleh sebab itu banyak negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menjadikan industri pariwisata sebagai sektor utama yang mampu meningkatkan perekonomian negaranya.

Oleh sebab itu IMT-GT memiliki strategi dalam mengembangkan sektor industri halal dengan melakukan promosi untuk meningkatkan minat global. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menggunakan teknologi media sosial dan aplikasi untuk mempromosikan industri pariwisata halal mereka. Hal ini merupakan bagian dari upaya IMT-GT untuk memanfaatkan penggunaan media dalam manajemen berita dan meningkatkan kesadaran tentang potensi industri halal di negara-negara anggota. Adanya strategi pengembangan industri pariwisata halal juga dilihat dari komunikasi strategis yang dibangun oleh negara IMT-GT untuk mengkampanyekan industri halal mereka. Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk membentuk persepsi suatu negara secara keseluruhan tanpa membedakan antar institusi dalam menjalankan tanggung jawabnya di bidang politik, perdagangan, pariwisata, investasi, dan hubungan budaya. Kegiatan ini dilakukan oleh negara anggota IMT-GT sebagai upayanya dalam meningkatkan sektor pariwisata halalnya di Asia Tenggara.

Selain itu terdapat *Focus Area on Halal Product And Services* yang dikembangkan oleh IMT-GT sebagai upaya meningkatkan perekonomian kawasan mereka melalui industri halal ini. Adapun ruang lingkup dari upaya ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang dipromosikan sebagai produk halal. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan perdagangan dan investasi pada produk halal dan layanan halal. Sehingga melalui peningkatan tersebut akan mendorong satu pilar strategis yang diusung oleh

negara anggota IMT-GT dalam *The Working Group on Halal Products and Service* untuk terus membangun ekosistem perekonomian islam. Perhatian khusus terhadap industri halal ini juga dimanfaatkan oleh IMT-GT untuk bisa menembus pasar halal global.

Untuk meningkatkan perdagangan dan investasi negara anggota IMT-GT terhadap produk dan layanan halal, IMT-GT telah menyusun target untuk beberapa tahun kedepan melalui *Implementation Blueprint* (IB) IMT-GT tahun 2022-2026 (IMT-GT,n.d). Dalam IB ini terdapat lima tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2026, yaitu: Penerimaan global yang lebih besar terhadap standar halal negara-negara; Anggota IMT-GT akan lebih banyak memiliki ahli teknis dan profesional di industri halal; Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan berorientasi pada ekspor halal; Lebih banyak produsen dan penyedia layanan halal; Akses konsumen yang lebih baik terhadap produk dan layanan halal.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut *The Working Group on Halal Products and Service* yang ada di IMT-GT akan melakukan beberapa strategi diantaranya: Memfasilitasi dan mempromosikan logo halal nasional, standar, dan skema sertifikasi untuk produk dan layanan halal; Memfasilitasi dan melakukan promosi bersama logo halal nasional dan melakukan tindakan kolaboratif untuk mempromosikan pengakuan produk dan layanan halal negara-negara anggota; Mengembangkan kurikulum halal untuk menghasilkan lebih banyak pakar teknis dan profesional di industri halal; Pertukaran pakar ahli di bidang halal; Mendorong lebih banyak kolaborasi antara UKM halal dan perusahaan besar lokal dan multinasional; Mempromosikan acara promosi perdagangan halal dalam IMT-GT; Memberikan pengetahuan halal kepada pelaku industri; Meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal; Mempromosikan kolaborasi lintas sektoral dalam akses informasi

Selain itu terdapat *The Working Group on Digital Transformation* dalam kerjasama IMT-GT yang berfungsi menerapkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk bisa mengoperasionalkan strategi di atas, yaitu diantaranya adalah: Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pelaku UMKM melalui pelatihan soft skill, perluasan tenaga kerja digital, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pemahaman kewirausahaan digital; Meningkatkan keterampilan dalam pekerjaan, termasuk keterampilan digital dan menciptakan inklusi serta aksesibilitas digital yang lebih besar; Mengimplementasikan dan meningkatkan Platform E-Commerce IMT-GT dan Mall IMT-GT dengan partisipasi UMKM; Menginginkan inisiatif atau program yang relevan untuk dikembangkan berdasarkan perjanjian ASEAN tentang E-Commerce 2019, termasuk inisiatif atau program yang sangat fokus pada fasilitas perdagangan dan inovasi yang lancar (misalnya platform digital), memungkinkan pembayaran digital yang lancar, memperluas basis talenta digital, dan mendorong kewirausahaan.; Mempromosikan pertukaran pengetahuan, kemampuan, inovasi, dan praktik terbaik; Mengembangkan dan mengimplementasikan proyek percontohan berdasarkan teknologi 4IR.; Memanfaatkan teknologi lokal di seluruh negara anggota.; Dan berinvestasi dalam proyek infrastruktur TIK, khususnya dalam meningkatkan konektivitas TIK di sepanjang ECS yang diprioritaskan.

Adanya kerjasama IMT-GT dalam industri halal dan pariwisata membuat ketiga negara ini menaruh perhatian untuk memanfaatkan peluang tersebut secara bersamaan dengan cara mengembangkan industri pariwisata halal. Adapun usaha yang ketiga negara ini lakukan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan dari program ini bisa dilihat dari ketiga negara tersebut berhasil menempati posisi teratas di bidang pariwisata yang menggunakan konsep *Muslim Friendly Travel* (MFT). Khususnya Thailand sebagai negara yang

minoritas muslim tapi mampu masuk dalam kategori TOP 20 *Non-OIC Destination* secara berturut-turut. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari laporan *Global Muslim Travel Index by Crescentrating Mastercard*.

Tabel II: Top Kategori Destinasi Yang Ramah Muslim Berdasarkan Global Muslim Travel Index 2018-2022

Negara Anggota IMT-GT	Global Muslim Travel Index	Peringkat	Skor
Indonesia (OIC Destination)	2017	3	72.6
	2018	2	72.8
	2019	2	78
	2020	-	-
	2021	3	73
	2022	2	70
Malaysia (OIC Destination)	2017	1	82.5
	2018	1	80.6
	2019	1	78
	2020	-	-
	2021	1	80
	2022	1	74
Thailand (Non-OIC Destination)	2017	2	61.8
	2018	2	56.1
	2019	2	57
	2020	-	-
	2021	4	55
	2022	3	51

Sumber: *Global Muslim Travel Index by Crescentrating Mastercard 2022*

Adanya kerjasama yang terjalin antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dapat dikatakan telah memanfaatkan semaksimal mungkin kerjasama ini untuk peningkatan konektivitas dan pertumbuhan di sektor pariwisata bagi ketiga negara anggota IMT-GT. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian pertumbuhan ekonomi IMT-GT yang berhasil mencapai US\$ 618. Maka dari itu IMT-GT diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perbatasan ketiga negara yang sebelumnya tertinggal (Menparekraf, 2023). Disisi lain keseriusan Thailand dalam mengembangkan industri pariwisata halal dengan menggandeng kawasan Thailand Selatan telah memberikan dampak positif terhadap upaya peredaman konflik yang terjadi di kawasan ini. Berbagai strategi dan upaya telah pemerintah Thailand lakukan dalam mengembangkan industri halal ini demi mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah yang ada di negara ini bahkan termasuk kawasan Thailand Selatan.

Adapun upaya tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Thailand sebagai aktor yang terlibat dalam konflik etnis muslim melayu telah memperhatikan tujuan pembangunan yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang inklusif, mencegah konflik agama dan etnis. Hal ini tentunya bertujuan untuk bisa menyelesaikan konflik berkepanjangan yang telah terjadi antara pemerintah Thailand dan kelompok separatis Muslim Melayu yang ada di kawasan Thailand Selatan. Semenjak industri pariwisata halal berhasil dikembangkan oleh Thailand, konflik yang terjadi di kawasan Thailand Selatan pun akhirnya mereda. Meski belum sepenuhnya masalah di wilayah ini terselesaikan, namun penurunan tingkat

ketegangan akibat konflik ini mulai menurun. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Deep South Watch* yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kekerasan dan kematian dan tragedi yang ada di kawasan Thailand Selatan

Tabel III: Data Penurunan Konflik di Kawasan Thailand Selatan

Year	Dead	Injured	Incident
2004	374	552	1472
2005	533	1017	2084
2006	658	1101	1996
2007	892	1670	2396
2008	448	965	1053
2009	490	1075	970
2010	452	927	1092
2011	512	1039	1161
2012	507	1021	1850
2013	521	1019	1791
2014	429	754	1354
2015	312	518	942
2016	309	630	815
2017	250	374	580
2018	218	265	544
2019	180	243	411
2020	116	161	335
2021	113	190	481
2022	30	57	158

Sumber: *Deep South Watch*, 2023

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2022 konflik kekerasan etnis muslim melayu yang ada di Kawasan Thailand Selatan telah menurun. Tahun tersebut juga bersamaan dengan peningkatan pengembangan industri pariwisata halal yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Thailand. Dimana di tahun 2017-2022 juga menjadi bukti keberhasilan Thailand akan keunggulan industri pariwisata halalnya. Saat ini agama Islam juga telah menjadi kelompok agama terbesar kedua yang ada di Thailand, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa terdapat 7,5 juta muslim Thailand di Kerajaan atau sekitar 12% dari total 62,5 juta penduduk Thailand. Perkiraan jumlah penduduk tersebut dibedakan berdasarkan agama-agama yang ada di Thailand (Royal Thai Embassy, 2019).

Adanya pengakuan terhadap masyarakat muslim saat ini melalui perkembangan industri pariwisata halal telah menjadikan kelompok muslim tidak lagi dianggap sebagai kelompok minoritas di Thailand. Kelompok muslim saat ini dapat menikmati status hukum dan politik yang sama dengan warga Thailand yang menganut agama lain seperti Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Masing-masing agama ini memiliki identitas, nilai-nilai dan praktik keagamaannya sendiri, serta tradisi budaya dan cara hidup yang berbeda. Namun semua hal tersebut tidak menjadi dasar untuk membedakan perlakuan dan penghormatan

terhadap setiap agama. Hal ini tentunya bertujuan untuk membangun kesejahteraan semua umat dan kelompok masyarakat demi menciptakan kawasan yang aman dan damai di negara Thailand.

SIMPULAN

Thailand sebagai negara minoritas muslim telah berhasil mengembangkan industri pariwisata halal dengan baik. Bahkan pemerintah Thailand melalui industri pariwisata halal ini juga telah menjadi instrumen perdamaian yang coba dilakukan untuk meredam konflik etnis muslim melayu yang ada di kawasan Thailand Selatan. Dengan kebijakan pemerintah dalam melibatkan masyarakat Thailand Selatan telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di kawasan tersebut. Keterlibatan kawasan Thailand Selatan dalam industri halal telah meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan ini yang sebelumnya tertinggal akibat konflik. Pemerintah dalam membangun masyarakat yang inklusif juga pada akhirnya dapat mengembalikan kepercayaan serta hak-hal umat muslim di kawasan tersebut.

Meskipun dengan adanya pengembangan industri pariwisata halal saat ini belum mampu sepenuhnya menyelesaikan konflik yang ada di kawasan Thailand Selatan, akan tetapi sejauh ini konflik yang ada di kawasan tersebut telah menunjukkan tingkat penurunan konflik yang signifikan. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa industri pariwisata halal bukan hanya menjadi sektor yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pedapatan negara saja. Melainkan industri pariwisata halal dapat menjadi sektor ekonomi yang mampu mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan terhadap suatu identitas yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menciptakan perdamaian. Adapun untuk pengembangan dari penelitian ini diharapkan kedepannya peneliti dapat fokus menganalisis bagaimana bentuk-bentuk implementasi dan pengembangan industri pariwisata halal yang ada di kawasan Thailand Selatan secara spesifik. Sejalan ini pembahasan terhadap bagaimana industri pariwisata halal dikembangkan di Thailand Selatan masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H. M. (2014, September 20). *halaltimes.com*. Retrieved January 16, 2024, from Thailand Hosts Halal Expo In Majority-Muslim Provinces: <https://www.halaltimes.com/thailand-hosts-halal-expo-majority-muslim-provinces/>

Ahmad, H. M. (2023, Mei 9). *halaltimes.com*. Retrieved Januari 25, 2024, from Thailand's Halal Exports Set to Soar with Global Recognition: <https://www.halaltimes.com/thailands-halal-exports-set-to-soar-with-global-recognition/>

Aljazeraa, (2019, Oktober 25). *aljazeera.com*. Retrieved Maret 7, 2024, from Muslim in south Thailand mark 15 years since "Tak Bai Massacre": <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/25/muslims-in-south-thailand-mark-15-years-since-tak-bai-massacre>

CNN Indonesia. (2023, Februari 27). *cnnindonesia.com*. Retrieved Januari 16, 2024, from Wisata Halal di Thailand yang Kian Memanjakan Wisatawan Muslim: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230227131507-269-918330/wisata-halal-di-thailand-yang-kian-memanjakan-wisatawan-muslim>

- CrescentRating, M. (2022, Juni). *crescentrating.com*. Retrieved Januari 16, 2024, from Global Muslim Travel Index 2022: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2022.html>
- Chuaniran, A. (2023, March 17). *Ways Sought to Lure Big-Spending Muslim Tourist* . Retrieved from Bangkokpost: <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2529874/ways-sought-to-lure-big-spending-muslim-tourists>
- CrescentRating, M. (2019, April). *crescentrating.com*. Retrieved Januari 16, 2024, from Global Muslim Travel Index 2019: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>
- Dwijayadi, D. K. (2016). Business as usual atau business for political purpose? Motif Pengembangan Pariwisata Halal di Thailand. *skripsi*, 108.
- IMT-GT. (n.d.). *IMPLEMENTATION BLUEPRINT 2017-2021*. Retrieved from imtgt.org: <https://imtgt.org/ib-2017-2021/>
- IMT-GT. (n.d.). *IMT-GT 2 nd Implementation Blueprint 2022-2026*. Retrieved Januari 28, 2024, from <https://imtgt.org/ib-2022-2026/>
- Kemenparekraf. (2022). *Persiapan Pengembangan Halal Tourism dan Muslim-Friendly di Indonesia* . Retrieved from kemenparekraf.go.id: <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/persiapan-pengembangan-halal-tourism-dan-muslim-friendly-di-indonesia>
- Mail, P. (2023, 8 Agustus). *pattayamail.com*. Retrieved Januari 26, 2024, from Halal Economic Corridor (HEC) launched in southern border provinces to boost local economy: <https://www.pattayamail.com/thailandnews/halal-economic-corridor-hec-launched-in-southern-border-provinces-to-boost-local-economy-437644>
- Mustaqim, D. A. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. *Journal of Islamic Economics*, 1, 26-33.
- mastercard & Crescentaring. (2017, MAY). *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017*. Retrieved from crescentrating.com: <https://www.crescentrating.com/gmti/detail.html?spot=4&s=3>
- Mastercard & Crescentrating. (2023, June). *Global Muslim Travel Index 2023*. Retrieved from crescentrating.com: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2023.html>
- Mastercard-Crescentrating. (2019, April). *Global Muslim Travel Index 2019*. Retrieved Agustus 20, 2023, from crescentrating.com: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>
- Mastercard-Crescentrating. (2022, Juni 2022). *Global Muslim Travel Index 2022*. Retrieved Agustus 19, 2023, from crescentrating.com: <https://www-crescentrating-com.translate.goog/reports/global-muslim-travel-index-2022.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>
- Pew Research Center. (2011, january 27). *The Future of the Global Muslim Population*. Retrieved from pewresearch.org: <https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/>

Royal Thai Embassy. (2019, September 17). *Muslims in Thailand*. Retrieved from riyad.thaiembassy.org: <https://riyadh.thaiembassy.org/th/page/29025-muslim-in-thailand-2?menu=5d80b46615e39c0a50006465>

Royal Thai Embassy, D. (2015, Juni 29). *doha.thaiembassy.org*. Retrieved Januari 21, 2024, from Tourism Authority of Thailand (TAT) Officially Launched App for Muslim Visitor: [https://doha.thaiembassy.org/en/content/57772-tourism-authority-of-thailand-\(tat\)-officially-launched-app-for-muslim-visitors](https://doha.thaiembassy.org/en/content/57772-tourism-authority-of-thailand-(tat)-officially-launched-app-for-muslim-visitors)

Purnama, C., dkk. (2021). Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal. *Jurnal Sosial Politik*, 7, 29-35.

Rabbani, M. N. (2023, Maret 7). *Konflik Minoritas Melayu-Muslim di Selatan Thailand*. Retrieved from unair.ac.id: <https://unair.ac.id/konflik-minoritas-melayu-muslim-di-selatan-thailand/>

Pisan. (2010, Mei 29). *isranews.org*. Retrieved Januari 24, 2024, from The new Chularatchamontri and the expectations from Muslim people: <https://www.isranews.org/content-page/item/2028-the-new-chularatchamontri-and-the-expectations-from-muslim-people.html>

Republika. (2023, Agustus 3). *republika.id*. Retrieved Januari 3, 2024, from Menengok Islam di Thailand: <https://www.republika.id/posts/43891/menengok-islam-di-thailand>

RI, K. (2019, April 8). *kemlu.go.id*. Retrieved Januari 28, 2024, from Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: https://kemlu.go.id/portal/id/read/162/halaman_list_lainnya/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt

PROFIL SINGKAT

Kartina Indah Puspitasari, lahir pada 22 September 2002 di Belopa. Penulis merupakan lulusan S-1 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa tahun 2024.